



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JEMAJA BARAT

Tahun

2025 - 2029



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat Barat Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di Kecamatan Jemaja Barat selama lima tahun mendatang. Dalam penyusunan dokumen ini, kami mengacu pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas, serta mempertimbangkan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan tantangan strategis yang dihadapi di tingkat kecamatan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan rencana ini agar tujuan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan Jemaja Barat.

Impol, 08 September 2025

Plt. CAMAT JEMAJA BARAT,

MUHAMMAD ARIAS, S.Pi

Pembina Tk.I (III/d)

NIP.19811119 201001 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Aparatur.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	20
2.5 Permasalahan dan Isu -Isu Strategis.....	23
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23
2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	28
2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	300
2.10 Penentuan Isu-isu Strategis.....	333
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	355
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	335
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
BAB IV	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN, SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	39
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	42
BAB V	
PENUTUP	474



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	11
Tabel 2. 2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	11
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin.....	112
Tabel 2. 4	
Sarana dan Prasarana Pendukung	113
Tabel 2. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas	116
Tabel 2. 6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	18
Tabel 2. 7	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	26
Tabel 3. 1	
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	36
Tabel 3. 2	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	38
Tabel 4. 1	
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jemaja Barat	41
Tabel 4. 2	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	43
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas	130



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Jemaja Barat, sebagai bagian dari Kabupaten Kepulauan Anambas, memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Terletak di wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Jemaja Barat menghadapi tantangan dan peluang yang khas. Untuk itu, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025–2029 menjadi langkah penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan setiap organisasi perangkat daerah, termasuk kecamatan, memiliki dokumen perencanaan yang terarah dan terukur. Renstra ini menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan menciptakan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sebagai kecamatan yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, Jemaja Barat menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Namun, potensi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta budaya lokal yang kaya merupakan modal besar untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, Renstra ini dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.



Dalam proses penyusunannya, Renstra ini mengedepankan prinsip partisipasi dan kolaborasi. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga sektor swasta, menjadi kunci utama dalam merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Jemaja Barat. Proses ini juga didukung oleh analisis mendalam terhadap data dan informasi terkini, yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Selaras dengan visi Kabupaten Kepulauan Anambas, Renstra Kecamatan Jemaja Barat mengarahkan pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Renstra ini juga memuat strategi dan indikator kinerja yang terukur, sehingga dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian pembangunan kecamatan secara berkala.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Kecamatan Jemaja Barat dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerahl
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 66);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043



- (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024);
 19. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat periode 2025–2029 memiliki maksud utama sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan arah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah secara efektif dan efisien.



b. Tujuan

Tujuan utama penyusunan Renstra ini adalah untuk menyelaraskan visi dan misi Kecamatan Jemaja Barat dengan kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini bertujuan agar setiap program kerja kecamatan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Secara khusus, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan dokumen panduan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas Kecamatan Jemaja Barat selama lima tahun ke depan.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi wilayah yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan.
3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah kecamatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.
4. Membangun sistem perencanaan yang akuntabel dan transparan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Mendorong implementasi program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Kecamatan Jemaja Barat, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Jemaja Barat periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan.

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Kecamatan Jemaja Barat, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Kecamatan Jemaja Barat.

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jemaja Barat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kecamatan memiliki tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Jemaja Barat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;



- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Camat

Pimpinan kecamatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Membantu camat dalam koordinasi administrasi, yang terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan

3. Seksi-seksi Teknis

Melaksanakan tugas-tugas teknis kecamatan, yang meliputi:

- Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pelayanan Umum

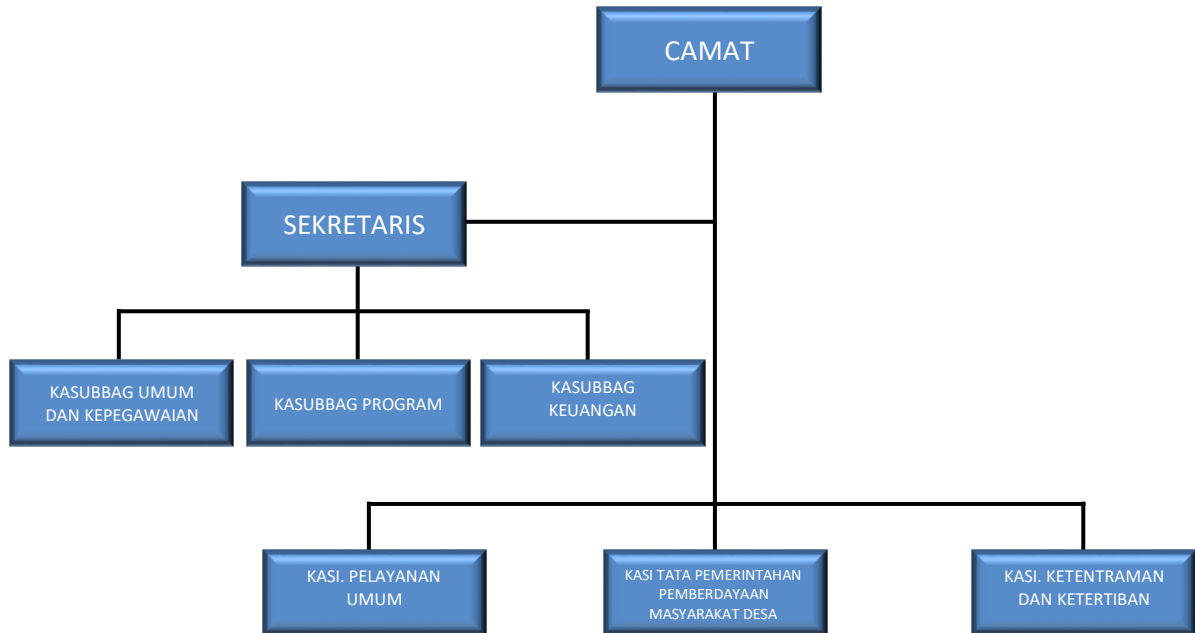
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mendukung pelaksanaan tugas tertentu berdasarkan keahlian dan kompetensi masing-masing. Lebih lanjut



Struktur Organisasi Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Jemaja Barat
Kabupaten Kepulauan Anambas



2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Jemaja Barat Per Januari 2025 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari 8 Pegawai Negeri Sipil dan 19 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :



Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Tk. I (IV.b)	Camat	1 Orang
Penata Tk. I (III.d)	Fungsional	2 Orang
Penata (III.c)	Fungsional	1 Orang
Penata Muda (III.a)	Fungsional	2 Orang
Pengatur Tk. I (II.d)	Pelaksana	2 Orang
PPPK (IX)	Fungsional	11 Orang
PPPK (V)	Fungsional	7 Orang
PPPK (IV)	Fungsional	1 Orang
Jumlah		27 Orang

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Kecamatan Jemaja Barat tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1.	ASN 27 Orang	S1 : 14 Orang
		D4 : 1 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 9 Orang
		SMP/SLTP : 1 Orang
		SD : -
Jumlah		27 Orang



c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Kecamatan Jemaja Barat didominasi kaum laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	17	10
Tenaga Honorer	-	-
Jumlah	17	10

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Kecamatan Jemaja Barat. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut



adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan P3K ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Barat juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Kecamatan Jemaja Barat diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Meja Kerja Kayu (serbuk)	2 Buah	2019
2	Kompas Gas (Alat Dapur)	1 Buah	2019
3	Laptop HP Core i7	2 Unit	2019
4	Laptop HP	1 Unit	2019
5	Printer Epson L120	2 Unit	2019
6	Printer Epson L3110	1 Unit	2019
7	Tiang Bendera (Besi)	1 Buah	2019



8	Lemari Besi	2 Unit	2020
9	Lemari Besi WO16	1 Unit	2020
10	Lemari Besi WO17	1 Unit	2020
11	Meja Kerja Pejabat	4 Buah	2020
12	Meja Kerja Pimpinan	2 Buah	2020
13	Kursi Putar	4 Buah	2020
14	Alat Dapur (alat pecah-belah)	1 Lusin	2020
15	Camera Canon	1 Buah	2020
16	Mesin Genset	1 Unit	2020
17	Komputer	2 Unit	2020
18	Laptop HP Core i7	2 Unit	2020
19	Laptop HP Notebook Core i5	3 Unit	2020
20	Laptop HP Core i5	2 Unit	2020
21	Scanner Epson Ds-410	1 Unit	2020
22	Printer Epson L3150	1 Unit	2020
23	Printer Epson L110	2 Unit	2020
24	Kipas Angin (Besi)	5 Buah	2020
25	CCTV	1 Unit	2021
26	Meja Kerja Kayu	2 Buah	2021
27	Kursi Putar	2 Buah	2021
28	Kursi Tamu (Sofa)	1 Set	2021
29	Telivisi LED 32"	1 Unit	2021
30	Sound System (Speaker Pasif)	2 Unit	2021
31	Audio Amplifer	1 Unit	2021
32	GPS Garmin	1 Unit	2021
33	Laptop Lenovo Intel Core i3	1 Unit	2021
34	Printer Epson L3110	4 Unit	2021
35	Tenda (Besi)	5 Buah	2021
36	Printer Epson L3210	1 Unit	2024

2.3 Kinerja Pelayanan

Kecamatan Jemaja Barat terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan administratif seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, dan layanan informasi publik dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses.



Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Jemaja Barat juga mengembangkan pendekatan yang berbasis teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Kecamatan Jemaja Barat aktif dalam membina dan mendampingi desa-desa di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti kegiatan jemput bola untuk pengurusan dokumen, telah menjadi salah satu langkah inovatif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan sinergi antara perangkat kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat, Kecamatan Jemaja Barat menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas dan inklusif.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jemaja Barat
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)								
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)								
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	-	-	-	20%	40%	60%	100%	-	-	20%	40%								
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	-	-	-	85%	87%	88%	88%	88%	90%	85%	85%	85%	85%								



Kinerja Kecamatan Jemaja Barat terus menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Berdasarkan data indikator kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi meningkat secara konsisten dari kategori CC (51,56) pada tahun 2021 menjadi B (69) pada tahun 2025, dengan proyeksi mencapai BB (71) pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan, dari kategori B (81,29) pada tahun 2021 menjadi A (87) pada tahun 2026, menunjukkan keberhasilan Kecamatan Jemaja Barat dalam memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat.

Dalam mendukung pembangunan desa, Kecamatan Jemaja Barat telah menargetkan peningkatan persentase desa berkembang menuju desa mandiri, yang dimulai pada tahun 2025 dengan capaian awal sebesar 20% dan direncanakan mencapai 100% pada tahun 2026. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tetap menjadi prioritas utama, dengan target partisipasi mencapai 100% setiap tahun hingga tahun 2026. Data ini menggambarkan komitmen Kecamatan Jemaja Barat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi yang kuat dalam setiap program pembangunan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan wilayah secara menyeluruh.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jemaja Barat, yaitu:

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	2,567,032,355	2,683,247,295	2,466,244,630	2,652,858,544	2,762,016,708	2,740,521,662				1,491,262,373			75.00%	76.00%	88.90%					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,893,000	4,580,400	1,382,200	1,380,000	5,000,000	2,319,368				1,370,000										
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,556,000	3,120,800	788,500	1,035,000	5,001,000	2,300,000				1,025,000										
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,322,000	2,930,800	939,200	1,380,000	5,090,414	2,200,000				1,370,000										
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,159,000	2,750,000	705,800	828,000	5,113,000	2,500,000				822,000										
Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	4,126,000	2,831,800	874,600	966,000	4,965,000	2,500,000				959,000										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan lkt hisar Realisasi Kinerja SKPD	6,207,000	3,130,800	834,600	1,380,000	5,900,000	2,100,000				1,370,000										
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,084,000	2,849,600	839,600	2,480,000	6,945,000	2,600,000				375,000										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,922,992,130	1,968,346,335	1,821,970,598	1,913,291,237	2,295,846,862	2,295,846,862				1,055,772,747			88.00%	78.00%	88.65%					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,825,444,130	1,862,443,335	1,772,605,398	1,814,742,237	2,196,521,862	2,196,521,862				1,015,772,747										
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	92,640,000	102,840,000	96,000,000	96,000,000	95,400,000	95,400,000				40,000,000										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,908,000	3,062,400	2,152,800	1,336,600	2,545,000	2,545,000				-										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan semesteran SKPD	-	-	1,212,400	1,212,400	1,380,000	1,380,000				-										
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,849,000	-	1,094,600	2,615,000	3,450,000	3,450,000				2,595,000										
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	-	-	-	1,235,000	1,380,000	1,380,000				1,225,000										
Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	15,849,000	-	1,094,600	1,380,000	2,070,000	2,070,000				1,370,000										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71,235,500	-	-	25,000,000	49,076,700	49,076,700				25,000,000										
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	41,099,500	-	-	25,000,000	49,076,700	49,076,700				25,000,000										
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,136,000	-	-	-	-	-				-										
Administrasi Umum Perangkat Daerah	329,353,400	253,889,000	221,201,500	223,691,048	324,642,428	324,642,428				163829600			89.00%	88.05%	89.00%					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,183,000	4,440,800	-	1,006,000	2,002,000	2,002,000				1,006,000										



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jemaja Barat serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelayanan di Kecamatan Jemaja Barat menghadapi tantangan dari sisi kualitas dan kuantitas SDM. Beberapa perangkat kecamatan belum memiliki kompetensi yang optimal sesuai dengan tuntutan tugas, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai di beberapa bidang menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi staf yang ada.

2. Keterbatasan Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan seperti kantor, perangkat IT, dan sarana komunikasi masih belum memadai. Hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil, belum dapat dilakukan secara maksimal dan efisien.

3. Pengelolaan Anggaran yang Terbatas

Anggaran operasional kecamatan yang terbatas menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan program strategis, termasuk pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.



4. Kurangnya Integrasi Sistem Informasi

Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, seperti sistem administrasi terpadu, membuat proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efisien.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Jemaja Barat juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Karakteristik Wilayah Kepulauan

Sebagai wilayah kepulauan, Kecamatan Jemaja Barat menghadapi tantangan geografis yang cukup besar, termasuk aksesibilitas antarwilayah yang sulit dan ketergantungan pada moda transportasi laut. Hal ini memengaruhi distribusi pelayanan dan ketersediaan sumber daya di wilayah terpencil.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya peran aktif dalam pembangunan serta prosedur administratif, sehingga partisipasi mereka dalam berbagai program kecamatan masih perlu ditingkatkan.

3. Dampak Perubahan Iklim

Kecamatan Jemaja Barat yang memiliki karakteristik pesisir menghadapi risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi. Hal ini dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

4. Persaingan dengan Wilayah Lain

Dalam konteks pengembangan pelayanan dan



pembangunan, Kecamatan Jemaja Barat perlu bersaing dengan kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendapatkan alokasi sumber daya dan perhatian dari pemerintah daerah..

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Jemaja Barat dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Potensi Pariwisata dan Sumber Daya Alam

Kecamatan Jemaja Barat memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata bahari, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan yang baik terhadap potensi ini dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik.

2. Kemajuan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang besar bagi Kecamatan Jemaja Barat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Implementasi layanan berbasis digital, seperti e-government dan aplikasi pelayanan masyarakat, dapat mempercepat proses administrasi dan memperluas jangkauan pelayanan.

3. Dukungan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan merupakan peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat. Hal ini dapat mendukung keberhasilan program pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal.



2.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja Barat memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik, membina pemerintahan desa, dan mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jemaja Barat dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang ada seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kinerja pelayanan yang optimal dan keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi secara mendalam untuk memahami permasalahan yang muncul dan isu strategis yang perlu ditangani.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Jemaja Barat tidak hanya mencakup aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga aspek eksternal seperti dampak perubahan iklim, tingkat partisipasi masyarakat, serta persaingan antardaerah dalam menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah. Dengan memahami permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Jemaja Barat dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala sekaligus memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung keberhasilan pembangunan di wilayahnya, Kecamatan Jemaja Barat perlu memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan menjadi langkah penting untuk mengungkap kendala-kendala yang muncul baik dari aspek internal maupun eksternal. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat, tetapi juga



untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Dengan pendekatan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, Kecamatan Jemaja Barat dapat menyusun langkah strategis yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Berikut disampaikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Barat, sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Pelayanan Administrasi Publik

- Kurangnya Aksesibilitas Layanan di Wilayah Terpencil

Wilayah geografis yang sulit dijangkau menyebabkan masyarakat di desa-desa terpencil mengalami keterbatasan akses terhadap layanan administrasi seperti penerbitan dokumen kependudukan dan perizinan.

- Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem pelayanan berbasis digital belum sepenuhnya diterapkan, sehingga proses pelayanan masih bergantung pada metode manual yang memakan waktu dan kurang efisien.

- Ketidacukupan Fasilitas Pelayanan

Beberapa fasilitas pendukung seperti kantor pelayanan, perangkat komputer, dan jaringan internet belum memadai untuk mendukung operasional yang optimal.

2. Permasalahan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa

Sebagian aparatur desa belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam mengelola pemerintahan



desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan administrasi.

- Koordinasi yang Belum Optimal

Sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa belum berjalan maksimal, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan kolaborasi intensif.

3. Permasalahan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata

Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayahnya.

- Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah

Banyak program pemberdayaan yang bergantung pada anggaran dari pemerintah daerah atau pusat, sehingga keberlanjutan program sering kali terganggu jika dukungan anggaran terbatas.

4. Permasalahan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Tantangan Penegakan Peraturan di Wilayah Terpencil

Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan dan penegakan peraturan secara konsisten.

- Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:



Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah yang Dihadapi	Akar Masalah
1	Pelayanan Administrasi Publik	- Kurangnya aksesibilitas layanan di wilayah perbatasan.	- Kondisi geografis yang masih belum terjangkau secara merata.
		- Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Sistem pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital.
		- Ketidakcukupan fasilitas pendukung pelayanan.	- Keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas.
2	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.	- Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.
		- Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dan pemerintah desa.	- Kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan efektif.
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum merata.	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan.
		- Ketergantungan pada bantuan pemerintah dalam program pemberdayaan.	- Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan atau kemandirian masyarakat dalam menjalankan program.
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Tantangan penegakan peraturan di wilayah terpencil.	- Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan rutin.
		- Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.	- Minimnya edukasi tentang hukum dan peraturan kepada masyarakat.

Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.



2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan
3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Barat terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) dan Ke-5 (Kelima) yaitu “Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi” dan “Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan”.



2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Kecamatan Jemaja Barat yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.* Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.



Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Kecamatan Jemaja Barat melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - (c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai



tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
- (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
- (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
- (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
- (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;



- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budidaya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan



ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.



2.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas, pembinaan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat menjadi fokus perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Jemaja Barat.

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu strategis ini diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah isu-isu strategis Kecamatan Jemaja Barat:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, melalui pengembangan infrastruktur pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa

Meningkatkan kompetensi aparatur desa serta memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayah kecamatan.



4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. .

5. Peningkatan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Memperkuat penegakan hukum dan ketertiban umum melalui edukasi masyarakat serta pengawasan yang lebih efektif, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

6. Mitigasi Risiko Perubahan Iklim

Mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi, dengan menyusun kebijakan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat lokal.

Isu-isu strategis ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Jemaja Barat. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis isu strategis, diharapkan program-program yang dirancang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025–2029 bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan. Tujuan utama dari dokumen ini adalah mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah. Dengan mengedepankan prinsip partisipasi dan kolaborasi, Renstra ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran strategis yang mencakup berbagai aspek pembangunan. Sasaran ini meliputi peningkatan kualitas infrastruktur dasar, aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor unggulan seperti perikanan dan pariwisata, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, sasaran pembangunan juga diarahkan pada pelestarian lingkungan hidup dan budaya lokal sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Jemaja Barat.

Melalui tabel berikut, disajikan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai setiap tahun selama periode 2025–2029. Rincian ini menjadi komitmen Kecamatan Jemaja Barat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan pembangunan yang inklusif. Implementasi tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat mendorong keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah Kecamatan Jemaja Barat.

**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jemaja Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	B	B	B	B	B
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	(60,10)	(63,15)	(67)	(69)	(71)
			Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	70%	75%	80%	85%	90%



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, Kecamatan Jemaja Barat merumuskan strategi yang berfokus pada penguatan potensi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelestarian lingkungan. Strategi utama yang diambil mencakup optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, strategi ini juga diarahkan pada peningkatan daya saing sektor unggulan, seperti perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal sebagai nilai dasar pembangunan.

Kebijakan yang mendukung strategi tersebut meliputi pengembangan program-program inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Pemerintah kecamatan akan memprioritaskan penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun regional, untuk mempercepat realisasi program strategis. Selain itu, kebijakan diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan efisiensi pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Melalui implementasi strategi dan kebijakan ini, Kecamatan Jemaja Barat diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:



Tabel. 3.2 (Table T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera			
Misi :	3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi			
	5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Tersedianya layanan yang cepat, efisien, dan terjangkau	- Mengembangkan infrastruktur pelayanan publik.	- Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan di wilayah perbatasan.
			- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Digitalisasi sistem pelayanan administrasi.
2	Memperkuat tata kelola pemerintahan	Peningkatan kapasitas aparatur desa	- Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.	- Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur desa.
		Optimalisasi koordinasi kecamatan dan desa	- Membentuk mekanisme komunikasi dan rapat koordinasi berkala.	- Penyusunan jadwal rutin dan pedoman pelaksanaan koordinasi.
3	Mendorong partisipasi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi.	- Penyusunan program edukasi pembangunan berbasis masyarakat.
		Penguatan program pemberdayaan masyarakat	- Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat berbasis ekonomi lokal.	- Penambahan dukungan teknis dan finansial untuk program pemberdayaan.

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah.



BAB IV

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran pembangunan Kecamatan Jemaja Barat periode 2025-2029, telah disusun rencana program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Selain itu, setiap program didukung oleh alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal.

Pendanaan untuk pelaksanaan program-program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan dukungan tambahan dari potensi sumber pendanaan lainnya. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan juga akan menjadi salah satu strategi dalam mengimplementasikan program.

Berikut adalah daftar program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Mendukung administrasi umum pemerintahan, seperti pengelolaan aset dan keuangan kecamatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelatihan dan pendampingan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menguatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketentraman wilayah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan melalui pembenahan tata kelola administrasi.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Menguatkan tata kelola desa melalui pelatihan aparatur dan supervisi rutin.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 (Tabel T-C.27).

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jemaja Barat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	12	13	14
Kecamatan Jemaja Barat		100%	100%	Rp3,016,430,754	100%	Rp3,076,739,369	100%	Rp3,137,047,984	100%	Rp3,197,356,599	100%	Rp3,257,665,214	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Rp2,628,620,003	100%	Rp2,688,928,618	100%	Rp2,716,192,458	100%	Rp2,740,908,179	100%	Rp2,801,216,794	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	76.69%	76.82%		77.45%		77.75%		77.90%		82.80%		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten	100%	100%	Rp17,480,800	100%	17,480,800	100%	17,480,800	100%	17,480,800	100%	17,480,800	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2,870,000	2 Dokumen	2,870,000	2 Dokumen	2,870,000	2 Dokumen	2,870,000	2 Dokumen	2,870,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1,870,400	6 Dokumen	1,870,400	6 Dokumen	1,870,400	6 Dokumen	1,870,400	6 Dokumen	1,870,400	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1,870,400	6 Dokumen	1,870,400	6 Dokumen	1,870,400	6 Dokumen	1,870,400	6 Dokumen	1,870,400	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2,870,000	3 Laporan	2,870,000	3 Laporan	2,870,000	3 Laporan	2,870,000	3 Laporan	2,870,000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	Rp2,365,197,402	100%	Rp2,389,976,126	100%	Rp2,412,986,437	100%	Rp2,436,100,602	100%	Rp2,459,445,908
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jumlah ASN	27 orang/bulan	27 orang/bulan	2,265,872,402	27 orang/bulan	2,288,531,126	27 orang/bulan	2,311,416,437	27 orang/bulan	2,334,530,602	27 orang/bulan	2,357,875,908
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	95,400,000	8 Dokumen	95,400,000	8 Dokumen	95,400,000	8 Dokumen	95,400,000	8 Dokumen	95,400,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2,545,000	5 Laporan	2,545,000	5 Laporan	2,670,000	5 Laporan	2,670,000	5 Laporan	2,670,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1,380,000	2 Laporan	3,500,000	2 Laporan	3,500,000	2 Laporan	3,500,000	2 Laporan	3,500,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	Rp3,450,000	100%	Rp6,967,842	100%	Rp7,174,842	100%	Rp7,402,541	100%	Rp7,402,542
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	6 Laporan	1,380,000	6 Laporan	4,897,842	6 Laporan	4,897,842	6 Laporan	4,897,841	6 Laporan	4,897,842
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2,070,000	5 Laporan	2,070,000	5 Laporan	2,277,000	5 Laporan	2,504,700	5 Laporan	2,504,700
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	0 paket	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	Rp161,276,410	100%	Rp173,276,410	100%	Rp173,276,410	100%	Rp174,276,410	100%	Rp174,276,410	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5 Paket	2,002,000	5 Paket	2,002,000	5 Paket	2,002,000	5 Paket	3,002,000	5 Paket	3,002,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	5 Paket	14,000,000	5 Paket	14,000,000	5 Paket	14,000,000	5 Paket	14,000,000	5 Paket	14,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket	10,000,000	5 Paket	10,000,000	5 Paket	10,000,000	5 Paket	10,000,000	5 Paket	10,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	5,274,410	5 Paket	7,274,410	5 Paket	7,274,410	5 Paket	7,274,410	5 Paket	7,274,410	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	3 laporan	20,000,000	3 laporan	20,000,000	3 laporan	20,000,000	3 laporan	20,000,000	3 laporan	20,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	110,000,000	4 laporan	120,000,000	4 laporan	120,000,000	4 laporan	120,000,000	4 laporan	120,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	Rp10,000,000	100%	Rp10,000,000	100%	Rp10,000,000	100%	Rp10,000,000	100%	Rp46,963,308	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	36,963,308	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	Rp44,359,039	100%	Rp64,371,088	100%	Rp65,997,231	100%	Rp64,371,088	100%	Rp64,371,088	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	24,359,039	2 Laporan	44,371,088	2 Laporan	45,997,231	2 Laporan	44,371,088	2 Laporan	44,371,088	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	20,000,000	2 Orang/bulan	20,000,000	2 Orang/bulan	20,000,000	2 Orang/bulan	20,000,000	2 Orang/bulan	20,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	Rp26,856,352	100%	Rp26,856,352	100%	Rp29,276,738	100%	Rp31,276,738	100%	Rp31,276,738	
Pemeliharaan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Mesin dan Lainnya	5 unit	5 unit	10,300,000	5 unit	10,300,000	5 unit	11,064,750	5 unit	13,064,750	5 unit	13,064,750	

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	16,556,352	1 unit	16,556,352	1 unit	18,211,987	1 unit	18,211,987	1 unit	18,211,987
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100%	100%	Rp237,817,751	100%	Rp237,817,751	100%	Rp259,399,526	100%	Rp265,746,120	100%	Rp265,746,120
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	237,817,751	2 Laporan	237,817,751	2 Laporan	259,399,526	2 Laporan	265,746,120	2 Laporan	265,746,120
PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Rp114,630,000	100%	Rp114,630,000	100%	Rp126,093,000	100%	Rp138,702,300	100%	Rp138,702,300
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Laporan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Laporan	10 Laporan	103,455,000	10 Laporan	103,455,000	10 Laporan	113,800,500	10 Laporan	125,180,550	10 Laporan	125,180,550
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Dan Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Dan Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	11,175,000	2 Laporan	11,175,000	2 Laporan	12,292,500	2 Laporan	13,521,750	2 Laporan	13,521,750
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	Rp35,363,000	100%	Rp35,363,000	100%	Rp35,363,000	100%	Rp52,000,000	100%	Rp52,000,000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Laporan	1 Laporan	6,622,000	1 Laporan	6,622,000	1 Laporan	6,622,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000
Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	3 Laporan	3 Laporan	28,741,000	3 Laporan	28,741,000	3 Laporan	28,741,000	3 Laporan	45,000,000	3 Laporan	45,000,000



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam periode sebelumnya, Kecamatan Jemaja Barat telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit pelaksana pemerintahan yang mendukung pembangunan daerah secara optimal. Penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, dengan fokus pada pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Pada urusan pelayanan dasar, pemerintah kecamatan telah berkontribusi dalam mendukung peningkatan akses pendidikan dan kesehatan melalui koordinasi lintas sektor dan fasilitasi program-program daerah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan air bersih, dan fasilitas publik juga menjadi salah satu capaian strategis yang mendukung aktivitas masyarakat.

Di sisi lain, dalam urusan pilihan yang melibatkan pengelolaan potensi lokal, Kecamatan Jemaja Barat berhasil mendorong pengembangan sektor perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif melalui berbagai program inovatif. Upaya ini diiringi dengan pelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kawasan wisata alam. Meskipun capaian ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan anggaran, aksesibilitas wilayah, dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini menjadi dasar penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan dalam periode mendatang.

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:



Tabel. 4.5 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kecamatan Jemaja Barat

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	
2	Nilai SAKIP	Nilai	60,10	63,15	67	69	71	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Persentase	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	

Tabel. 4.6 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Nilai SAKIP	BAIK	60,10	63,15	67	69	71	71
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Baik	70%	75%	80%	85%	90%	90%
3	Indek Kepuasan Masyarakat	79,69	76,69	76,82	77,82	77,45	77,90	77.90

Tabel ini mencerminkan komitmen Kecamatan Jemaja Barat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.



BAB V PENUTUP

Dengan selesainya Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025–2029 ini disusun, kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman yang komprehensif bagi seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Jemaja Barat. Renstra ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi juga menjadi wujud sinergi antara masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan partisipasi aktif, dukungan, dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami mengundang semua pihak untuk berperan serta secara aktif dalam mengimplementasikan rencana strategis ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Jemaja Barat serta menjadi pijakan yang kuat untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Terima kasih atas perhatian dan kontribusi semua pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen ini..

Impol, 08 September 2025

Plt. CAMAT JEMAJA BARAT,

MUHAMMAD ARIAS, S.Pi
Pembina Tk.I (III/d)
NIP.19811119 201001 1 007